

BERITA ACARA
PENYAMPAIAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WAY KANAN

Pada Hari Kamis Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah disampaikan hasil monitoring dan evaluasi capaian Kinerja Triwulan IV Atas Rencana Aksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.

Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Way Kanan Melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebagai Berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- 1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.3.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.4.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.5.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

2.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 2.1.1. Pelayanan Informasi Publik
- 2.1.2. Layanan Hubungan Media
- 2.1.3. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- 2.1.4. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Aplikasi Informatika

3.1. Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- 3.1.1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 3.1.2. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- 3.1.3. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- 3.1.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

4.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

- 4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- 4.1.2. Membangun Metadata Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

5.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 5.1.1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 5.1.2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

- 5.2.1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Hambatan dan Solusi/Rekomendasi

Target sasaran belum mencapai target, hal tersebut dikarenakan :

1. SKPD/OPD belum mendefinisikan dan memiliki dokumentasi atas proses tata kelola
2. SKPD/OPD belum memiliki kebijakan internal yang mengatur standar proses tata kelola secara terpadu.
3. SKPD/OPD belum didukung oleh struktur organisasi yang memadai. Maupun untuk solusi agar mencapai target sasaran.

Selanjutnya sasaran Meningkatkan Kualitas Domain Layanan SPBE melampaui target renstra hal tersebut dikarenakan :

1. Pemerintah daerah melalui SKPD telah menyediakan Domain Layanan SPBE
2. Pemerintah telah menyediakan sistem aplikasi yang memberikan layanan SPBE dalam hal menyediakan fasilitas transaksi yaitu memberikan layanan setelah terjadi transaksi pembayaran atau pertukaran informasi. pengguna SPBE sudah dapat melakukan pembayaran melalui kanal lain seperti perbankan dan selanjutnya dapat menerima layanan SPBE,

Solusi/Rekomendasi agar mencapai Target Capaian kinerja adalah kolaborasi atau integrasi antara layanan kepegawaian dan layanan pengadaan, baik di internal atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Adapun Realisasi Anggaran dan Realisasi Target sasaran terlampir Dalam berita acara ini, Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani Tim Monev dan penanggungjawab program/kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2023 Akhir dari monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja atas Rencana Aksi Tahun 2023.

**TIM MONITORING DAN EVALUASI DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA ATAS RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WAY KANAN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	NURMANINGSIH, S.Pd., M.Pd	KETUA	
2	HERI APRIADI, S.Kom	SEKRETARIS	
3	NAZAIRIN, S.Sos., M.IP	ANGGOTA	
4	JUNAIDI ALFIUS, S.Kom., M.M.	ANGGOTA	
5	IMI PATRIAN	ANGGOTA	

**Realisasi Anggaran dan Realisasi Target sasaran
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Way Kanan
Triwulan IV Tahun 2023**

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PENDANAAN	TARGET	REALISASI TRIWULAN I-IV	PERSENTASE	KETERANGAN
Meningkatnya Kualitas SAKIP		Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kominfo		33.78 Poin			Hasil penilaian Belum dirilis oleh Instansi yang berwenang sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kominfo		51.15 Poin			Hasil penilaian Belum dirilis oleh Instansi yang berwenang sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo		100 %	25%	100%	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah		Rp.105.000.000,-	422.451.611	401 %	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		3.116.558.669		2.969.437.115	95,28%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Kominfo	9.403.000		9.398.400	99,95%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.000.000	3.000.000	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan		3.403.000			

	Dokumen RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.403.000	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000		2.995.400	99,85%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Kominfo	1.917.029.669		1.806.756.910	94,25%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.907.703.669		1.797.431.510	94,22%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000		5.000.000	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.326.000		4.325.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	171.895.000		171.092.500	99,53%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.000.000		6.000.000	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31.600.000		31.600.000	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24.600.000		24.400.000	99,19%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	14.695.000		14.695.000	100%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000		15.000.000	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000		79.397.500	99,25%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	948.231.000		912.189.305	99,20%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	798.000.000		761.958.305	95,48%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	150.231.000		150.231.000	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	70.000.000		70.000.000		

Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40.000.000		40.000.000	100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30.000.000		30.000.000	100%	
Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik		Cakupan Pelayanan Informasi Publik Yang Dikelola		82 Poin			Penilaian belum dilakukan oleh komisi Informasi Dengan Dasar Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang metode dan teknik evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pelayanan Informasi Publik Yang Dikelola	3.196.178.000		3.194.490.965	99,95%	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Informasi Publik Yang Dikelola	3.196.178.000		3.194.490.965	99,95%	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	32.500.000		32.449.540	99,84%	
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3.030.678.000		3.029.041.800	99,95%	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	123.000.000		122.999.625	100%	
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000		10.000.000	100%	
Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal		Nilai Indeks Domain Kualitas Domain Kebijakan Internal		2.55 Poin			nilai belum dirilis oleh Kemenpan –RB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE		Nilai Indeks Kualitas Domain Tata Kelola SPBE		2.55 Poin			
Meningkatnya		Nilai Indeks Kualitas Domain Manajemen SPBE		2.55 Poin			

Kualitas Domain Manajemen SPBE							
Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE		Nilai Indeks Kualitas Domain Layanan SPBE		2.55 Poin			
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1. Nilai Indeks Domain Kualitas Domain Kebijakan Internal 2. Nilai Indeks Kualitas Domain Tata Kelola SPBE 3. Nilai Indeks Kualitas Domain Manajemen SPBE 4. Nilai Indeks Kualitas Domain Layanan SPBE	205.000.000		202.110.250	98,59%	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai Indeks Domain Kualitas Domain Kebijakan Internal 2. Nilai Indeks Kualitas Domain Tata Kelola SPBE 3. Nilai Indeks Kualitas Domain Manajemen SPBE 4. Nilai Indeks Kualitas Domain Layanan SPBE	205.000.000		202.110.250	98,59%	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000		84.950.000	99,94%	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	47.000.000		46.804.425	99,58%	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	53.000.000		53.000.000	100%	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Adanya Monitoring Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	20.000.000		17.355.825	86,78%	
Meningkatnya Pemenuhan Data Bagi Satu Data Way Kanan		Persentase Peningkatan Data Pada Satu Data Way Kanan		15 %		100%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Peningkatan Data Pada Satu Data Way Kanan	96.617.000		96.597.272	99,98%	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Data Pada Satu Data Way Kanan	96.617.000		96.597.272	99,98%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	10.000.000		10.000.000	100%	

	Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral					
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	86.617.000		86.597.272	99,95%	
Meningkatnya sistem Keamanan Informasi		Indeks keamanan informasi		225 poin	-	-	Nilai Belum dievaluasi dengan area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	20.000.000		20.000.000	100%	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keamanan Informasi	20.000.000		20.000.000	100%	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5.000.000		5.000.000	100%	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000		15.000.000	100%	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Keamanan Informasi	10.000.000		10.000.000	100%	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	10.000.000		10.000.000	100%	

A. Permasalahan

Hasil evaluasi kinerja Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Way Kanan secara umum sama dengan permasalahan pada tahun sebelumnya yaitu :

1. Kurang/Rendahnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi Pada Bidang Teknologi, Informasi Dan Komunikasi.

- Seperti yang dijelaskan pada Sebelumnya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Way Kanan sangat membutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki spesifikasi (Keahlian) Sebagai berikut :
- Programmer Aplikasi yang bertugas membuat aplikasi pada Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan
- Programmer web yang bertugas mengembangkan situs web Kabupaten dan Situs web SKPD hingga situs web kelurahan/kampung serta mengembangkan operasional Situs web dan Aplikasi Lainnya yang dibutuhkan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan
- Tenaga Ahli Jaringan (Network Engineer) yang bertugas mengatasi persoalan jaringan atau network, baik dari segi pemeliharaan hingga *mengatasi permasalahan jaringan*
- Database Administrator yang bertugas memelihara, merawat, serta membuat cadangan (*back-up*) database yang ada di dalam sebuah sistem.
- Security Engineer yang bertugas mencegah gangguan serta menyelesaikan masalah teknis dari data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital *dan menyelesaikan masalah Komputer yang digunakan.*

2. Kurangnya Infrastruktur/Sarana Pendukung dan terbatasnya dukungan Anggaran

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Way Kanan sangat membutuhkan Sarana dan Prasarana Pendukung Diantaranya :

- Komputer dan Laptop yang berkualitas dalam rangka mendukung penuh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keterbukaan Informasi public serta maksimalnya pengelolaan Data dan keamanan Informasi
- Pembangunan Gedung kantor yang representatif dengan kelengkapan Pusat Data dan Informasi dengan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Media Center

3. Strategi / Rekomendasi

Dalam upaya mewujudkan Sasaran dan Tujuan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun strategi Sebagai Berikut :

- Meningkatkan komitmen dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-Government*) Pemerintah Kabupaten Way Kanan
- penguatan infrastruktur jaringan internet lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada semua Satuan kerja Perangkat Daerah
- Menjamin ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat
- Pembangunan sistem aplikasi pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik
- Pembangunan Infrastruktur/ jaringan Telekomunikasi hingga Tingkat Kampung
- Penyajian Data statistik Sektoral yang akurat dan Akuntabel
- Meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya aparatur Dinas Kominfo Kabupaen Way Kanan yang menguasai Teknologi Informasi secara berkala dan berkelanjutan

Dalam menjalankan strategi Sebagaimana poin diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan akan mengambil arah kebijakan dengan mengimplementasikan Program yang menjadi Prioritas Tujuan Dan Sasaran RPJMD serta implementasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri **050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah**

